

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan distribusi pendapatan secara merata. Pembangunan ekonomi di Indonesia disebut sebagai strategi pembangunan Indonesia yang tujuan utamanya adalah mewujudkan hak-hak dasar masyarakat dan membangun landasan yang kokoh bagi pembangunan. Indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pengangguran.

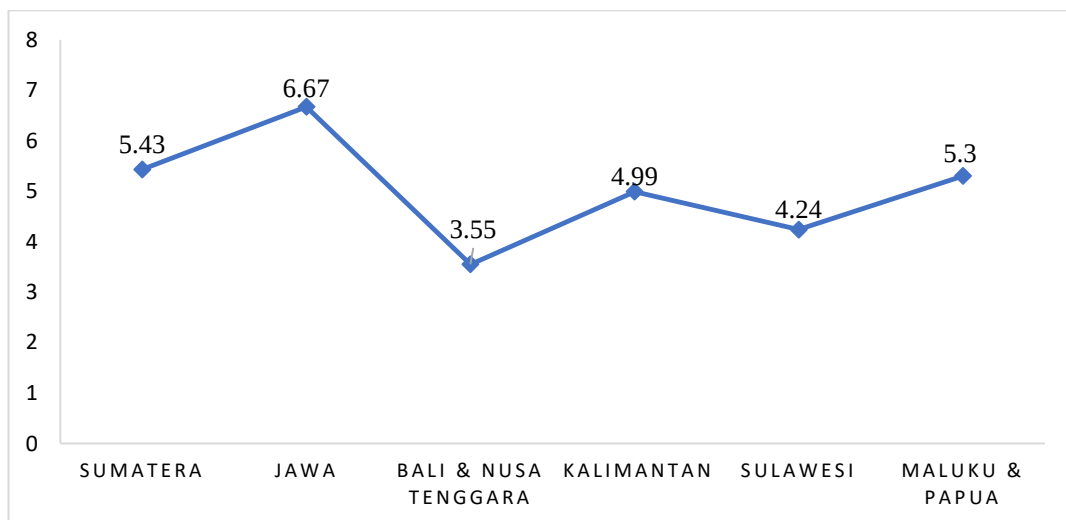
Pengangguran merupakan salah satu dari sekian banyak masalah perekonomian seperti halnya masalah kemiskinan, kesenjangan distribusi pendapatan atau masalah lainnya yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saat ini. Dalam hal ini, negara berkembang tidak mampu menghadapi masalah tersebut dengan memberikan tunjangan kepada masyarakat yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan tersebut. Oleh sebab itu, pengangguran dapat menyebabkan gejala sosial di masyarakat karena seseorang yang tidak bekerja mereka tidak bisa memperoleh penghasilan. Terjadinya pengangguran di suatu negara dapat dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan di

suatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja atau jumlah permintaan lapangan pekerjaan akan penawaran lapangan kerja tidak seimbang, hal tersebutlah yang berakibat bertambahnya tingkat pengangguran terbuka (Hikmah et al., 2021).

Tingkat pengangguran terbuka merupakan masalah besar bagi suatu wilayah maupun negara dan sulit terpecahkan. Adanya jumlah angkatan kerja yang relatif besar, perpindahan penduduk, dan krisis ekonomi yang masih berlangsung membuat persoalan ketenagakerjaan sulit diselesaikan. Persoalan ini semakin rumit dengan adanya perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang penyebabnya terkait dengan upah, gaji, tingkat inflasi yang cenderung naik serta permasalahan ekonomi lainnya. Adanya pengangguran menyebabkan menurunnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan masalah kemiskinan dan permasalahan ekonomi lainnya.

Sebagai negara berkembang Indonesia tidak terlepas dari salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Jumlah Pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi di setiap wilayah. Penyebab pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja, dapat menyebabkan persaingan ketat. Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia yang sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, lapangan kerja menjadi indikator penting dalam kesejahteraan masyarakat dan menjadi indikator keberhasilan dalam pendidikan yang dapat mengurangi angka pengangguran yang ada. Pengangguran adalah orang yang berada dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan

dengan tingkat gaji yang diinginkan, namun pekerjaan tersebut belum ditemukan. Pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun pengangguran juga berdampak terhadap bidang sosial dan pendidikan (Sukirno, 2008).



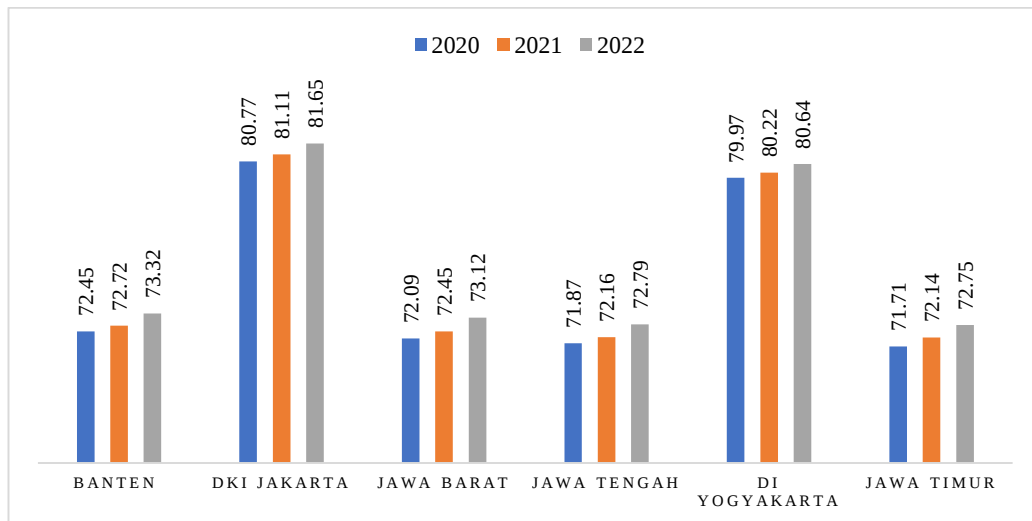
Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Antar Pulau di Indonesia
Tahun 2022 (Persen)**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Pulau Jawa menempati urutan pertama tingkat pengangguran sebesar 6,67 persen, lalu urutan kedua ditempati Pulau Sumatera dengan tingkat pengangguran sebesar 5,43 persen, diikuti oleh Pulau Maluku dan Papua 5,30 persen, kemudian Pulau Kalimantan 4,99 persen, Pulau Sulawesi 4,24 persen, dan terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,55 persen. Pulau Jawa masih menjadi urutan tertinggi terhadap tingkat pengangguran dibandingkan dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang terdiri dari enam provinsi. Pulau Jawa menjadi daerah terpadat di Indonesia karena menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perekonomian, dan pusat pendidikan sehingga

banyak orang yang bermigran dan menetap di Pulau Jawa dan persaingan dalam mencari pekerjaan di Pulau Jawa pun semakin ketat.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2022 (Persen)

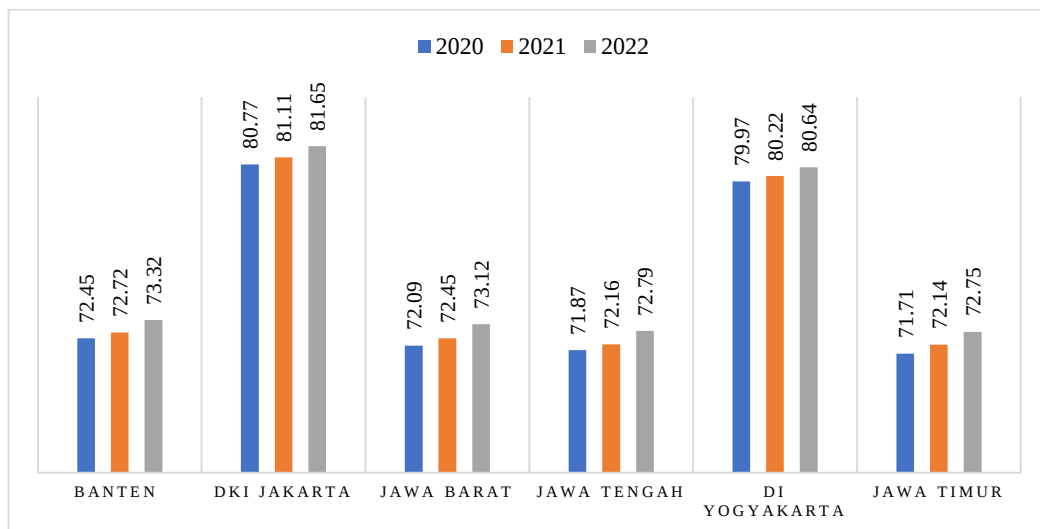
Berdasarkan Gambar 1.2 diatas menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten pada tahun 2020-2022. Ada tiga provinsi di Pulau Jawa dengan presentase tertinggi yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tingkat pengangguran di Pulau Jawa mengalami ketidakstabilan dan selalu mengalami perubahan selama kurun waktu 5 tahun dari 2018-2022 selalu mengalami perubahan naik-turun gejala ini disebut dengan fluktuatif. Meskipun perubahannya tidak terlalu tinggi, namun tetap saja perubahan tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian. Karena perekonomian yang baik dicerminkan dari penurunan tingkat pengangguran yang semakin menurun dari tahun ketahun.

Fluktuatif tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh banyak indikator. Permasalahan terhadap tingkat pengangguran terbuka sangat kompleks untuk dikaji

serta merupakan salah satu isu yang menarik, hal ini karena mempunyai kaitan dengan beberapa indikator ekonomi. Beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Angkatan Kerja.

Indikator pertama yang mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa yaitu indeks pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposif yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran Indonesia, artinya semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka tingkat pengangguran akan menurun (Soekapdjo & Oktavia, 2021).

Indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas (Napitupulu, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang bersedia bekerja guna mengurangi tingginya angka pengangguran di suatu daerah.



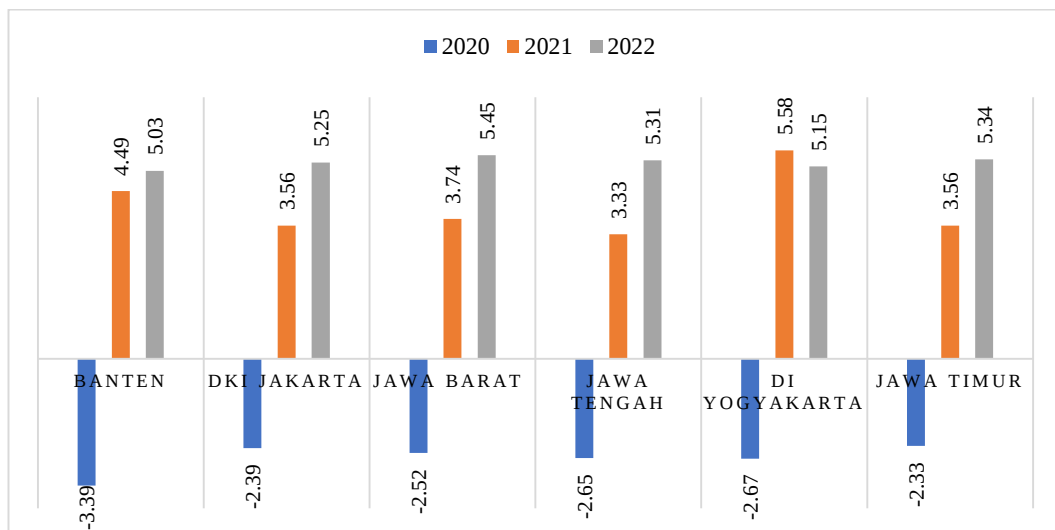
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2022 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.3 bahwa di setiap Provinsi di Pulau Jawa terjadi kenaikan nilai indeks pembangunan manusia setiap tahunnya selama 2020-2022. Maka dengan adanya peningkatan nilai indeks pembangunan manusia dapat berpengaruh terhadap menurunnya angka pengangguran. Semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran (Todaro, 2011).

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi

mempunyai peran yang penting karena dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dapat memicu keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat mewujudkan pemerataan kemakmuran penduduk dalam suatu negara. Dengan meningkatnya kapasitas pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan sektor industri yang dapat meningkatkan *output* sehingga dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk (Tambunan, 2001).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa berada pada kondisi berfluktuatif selama tahun 2020 sampai 2022. Dimana tahun 2020 mengalami penurunan karena saat covid-19 melanda dunia, pertumbuhan di Pulau Jawa pun menurun. Di tahun 2021 sampai 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan sektor-sektor ekonomi di Pulau Jawa membaik. Pertumbuhan penduduk merupakan proses perubahan jumlah penduduk

serta komposisinya yang dipengaruhi tiga komponen demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (Mulyadi, 2003).

Menurut teori Sukirno (1994) pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang negatif yang berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran menurun. Pertumbuhan ekonomi terjadi adanya penambahan GDP. Dimana GDP adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam suatu negara.

Indikator berikutnya yang mempengaruhi pengangguran yaitu upah minimum provinsi. Menurut Effendy (2018) upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Selain itu, upah juga merupakan hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan (Ryan *et al.*, 2017).

Upah minimum provinsi yang tinggi dapat membantu meningkatkan pendapatan pekerja dan dapat mengurangi kemiskinan. Namun, upah minimum provinsi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan inflasi mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Adanya kebijakan pemerintah dalam penetapan upah seperti dalam penetapan upah minimum provinsi diharapkan dapat mengatasi permasalahan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Adanya

perbaikan upah berarti akan ada peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa secara makro yang dapat mendorong perkembangan perusahaan kerja yang tinggi dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi pula, begitupun sebaliknya.

**Tabel 1. 1 Upah Minimum Provinsi Pada Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2020-2022 (Ribu Rupiah)**

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
Banten	2.460.996	2.460.996	2.501.203
DKI Jakarta	4.267.349	4.416.187	4.573.845
Jawa Barat	1.810.351	1.810.351	1.841.487
Jawa Tengah	1.742.015	1.798.979	1.812.935
DI Yogyakarta	1.704.608	1.765.000	1.840.916
Jawa Timur	1.768.777	1.868.777	1.891.567

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat upah minimum provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Upah merupakan faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran, sehingga jumlah upah yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat pengangguran yang ada (N. G. Mankiw 2006). Sedangkan, setiap kenaikan upah diikuti oleh turunnya tenaga kerja sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

Indikator lainnya yaitu angkatan kerja yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Angkatan kerja merupakan penduduk yang usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan menganggur. Menurut Mankiw (2018) angkatan kerja adalah jumlah

pekerja, termasuk mereka yang memiliki pekerjaan maupun yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi angkatan kerja termasuk juga didalamnya jumlah pengangguran. Angkatan kerja yang tinggi dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi pula, begitu pun sebaliknya.

**Tabel 1. 2 Jumlah Angkatan Kerja Pada Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2020-2022 (Orang)**

Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
Banten	6.213.233	6.260.654	6.463.631
DKI Jakarta	5.232.031	5.177.314	5.252.396
Jawa Barat	24.207.930	24.743.628	25.578.174
Jawa Tengah	17.536.935	17.835.770	18.390.459
DI Yogyakarta	2.228.162	2.334.955	2.336.076
Jawa Timur	20.962.967	21.037.750	22.869.012

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah angkatan kerja pada enam Provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan terus menerus setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja lebih besar dari jumlah penduduk dari setiap provinsi masing-masing. Penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap keberadaan perekonomian di suatu daerah. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, mereka termasuk yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan bekerja (Sumitro Djojohadikusumo, 1987).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2022?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka secara parsial di Pulau Jawa tahun 2016-2022?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan angkatan kerja secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan angkatan kerja secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan angkatan kerja secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2016-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat umum. Berikut ini dijelaskan manfaatnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menanggulangi pengangguran serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

1.4.2 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka, serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.3 Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

1.5 Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan pengambilan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber relawan

lainnya yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia dalam keuangan daerah.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak keluarnya Surat keputusan pada bulan September 2023, yang diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, seminar usulan penelitian, menganalisis data, penyusunan skripsi, dan sidang akhir skripsi. Berikut matriks dari jadwal penelitian ini:

Tabel 1.3 Matriks Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2024													
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Persiapan Administarsi														
Pengajuan Judul														
Pembuatan Proposal Skripsi														
Sidang Proposal Skripsi														
Revisi Proposal Skripsi														
Penyusunan Skripsi														
Pengumpulan Data														
Sidang Skripsi														
Revisi Skripsi														